

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM AR RAHMAT KECAMATAN SURUH

Endang Tri Ekowati<sup>1</sup>, Sunandar<sup>2</sup>, Ngurah Ayu Nyoman M<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Guru di Kabupaten Semarang

<sup>2)</sup> Dosen Universitas PGRI Semarang

### ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam manajemen administrasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perencanaan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan; (2) pengorganisasian SDM untuk manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan; (3) pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan; (4) sistem pengawasan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan Kredibilitas, Transferability, Dependability, dan Confirmability.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan anggaran pendidikan SD Islam Ar Rahmah disusun dan dituangkan dalam bentuk RAB yang diadakan pada tiap akhir tahun dengan menetapkan semua program beserta anggaran masing-masing program. Melibatkan stakeholders sekolah, melalui rapat serta keputusan rapat yang sudah di sepakati diputuskan lagi oleh ketua yayasan; 2) Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana itu sendiri. Kedua pengorganisasian sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut. Di lihat dari struktur organisasi yang bertanggung jawab mengelola keuangan di SD Islam Ar Rahmah adalah kepala sekolah; 3) Pelaksanaan Anggaran di SD Islam Ar Rahmah Suruh digunakan untuk pembiayaan program sekolah serta belanja barang dan jasa dan pengembangan; 4) Pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah dilakukan oleh yayasan Ar Rahmah Suruh dan dinas kependidikan. Kemudian, pertanggungjawaban pembiayaan sekolah diserahkan kepada Komite Sekolah, Yayasan Ar Rahmah, dan dinas pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan, Mutu Pendidikan.

### A. PENDAHULUAN

Faktor biaya memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Penyadaran akan pentingnya biaya pendidikan itu tidak saja dirasakan

pada saat presiden atau pemerintah menetapkan besarnya biaya pembangunan pendidikan pada setiap tahun dalam APBN, tetapi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul pada saat memikirkan bagaimana meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan masalah mutu, pemerataan, efisiensi dan relevansi pendidikan. Semua pemikiran ini akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. Dengan demikian, maka biaya pendidikan merupakan faktor masukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kurniady, Setiawati, dan Nurlatifah, 2015: 266).

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga), manajemen pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus terus ditingkatkan kualitasnya. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Perencanaan dan penggunaan biaya tersebut menggambarkan aktivitas manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan manajemen pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya

pendidikan yang berkualitas (Fadillah, Agung, dan Yudana, 2015: 4).

Mahalnya biaya pendidikan selalu menjadi masalah antara lembaga penyelenggara pendidikan yang menaikkan biaya pendidikan dengan pertimbangan biaya operasional yang tentu saja akan berdampak pada kemampuan finansial masyarakat. Hal ini menuntut strategi manajemen pembiayaan pendidikan baik di masyarakat maupun lembaga penyelenggara pendidikan.

Dari aspek manajerial, kepala sekolah harus mampu memahami tugas dan proses manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari penyusunan RKAS bagi sekolah dengan sumber pendanaan dari BOS. Pemahaman yang baik terhadap penyusunan RKAS akan memiliki dampak yang baik pula secara tidak langsung terhadap optimalisasi pengalokasian dana yang diberikan pemerintah. Selain itu, perencanaan dan pengawasan penggunaan pembiayaan tersebut perlu ditingkatkan agar mampu mencapai mutu pendidikan yang baik. Tugas setiap proses manajemen pembiayaan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada akhirnya hal itu semua diharapkan mampu memenuhi standar nasional pendidikan sehingga mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan.

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal tersebut sebagaimana diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan kejelasan pemberian

pedoman penyusunan APBS oleh Depdiknas, pengawasan terhadap pembiayaan sekolah yang optimal, dan tenaga yang kompeten dalam mengelola manajemen pembiayaan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan selain sumber dana yang terbatas dan tidak meratanya dana pendidikan yang diterima, juga terkait kurang transparannya manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah yang mengarah pada praktik korupsi. Selama satu dekade terakhir dari 2007 sampai 2017, terdapat total 425 kasus korupsi di sektor pendidikan. Kasus tersebut memberikan kerugian negara dengan nilai suap mencapai Rp 1.3 triliun dan Rp 55 miliar dan jumlah tersangka terkait seluruh kasus mencapai 618 orang (Puspitasari, 2017: 10).

Pada tataran teknis, manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Meskipun sekolah swasta sudah mendapat dana BOS, sekolah biasanya tetap menarik SPP setiap bulannya untuk menunjang operasional yang lain. Menurut Wijaya (2009: 47) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan" menerangkan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN dan APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan, dalam praktiknya sekolah swasta cenderung mendapatkan porsi anggaran yang lebih kecil dibandingkan sekolah negeri. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala sekolah, dana BOS untuk SD Islam Ar Rahmah juga demikian. Mereka seringkali mengalami keterlambatan pencairan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, yang biasanya cair dalam waktu 3 bulan sekali, seringkali dicairkan di akhir bulan. Masalah ini seringkali menyulitkan pihak sekolah untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.

Sebagai sekolah dasar yang baru berdiri tahun 04 Oktober 2008 dengan nomer SK 821.2 / 0774 /2008, SD Islam Ar Rahmah terkategori berkembang sangat pesat dilihat dari beberapa aspek, seperti prestasi, jumlah peserta didik, penerimaan dana pendidikan, serta pengelolaannya yang berkorelasi positif terhadap mutu pendidikan mereka. Walaupun SD Islam Ar Rahmah membebankan biaya pendidikan ke siswa

didiknya, hal itu masih terjangkau karena mereka dapat mencari sumber pendanaan lain secara optimal. Jadi menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana SD Islam Ar Rahmah mengelola pembiayaan pendidikan sebagai sekolah dasar swasta yang baru berdiri 10 tahun.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, pada triwulan 1 tahun 2017, Kabupaten Semarang menerima dana BOS sebesar Rp. 12,289,440,000 untuk 76,809 orang siswa yang tersebar ke 509 sekolah dasar negeri dan swasta. Kecamatan Suruh sendiri memperoleh alokasi dana BOS sebesar Rp. 724,320,000 (6 persen dari total BOS se-Kabupaten Semarang) untuk 4,527 siswa dari 37 SD negeri dan swasta. Menurut data yang sama, SD Islam Ar Rahmah mendapatkan alokasi dana BOS sebesar Rp. 66,400,000, tertinggi se-Kecamatan Suruh yaitu 9.17 persen dari total dana BOS se-Kecamatan Suruh dengan jumlah murid terbanyak, yaitu 415 orang.

Satu tahun kemudian, yaitu triwulan 1 tahun 2018, penerimaan dana BOS Kabupaten Semarang berkurang 0.84 persen menjadi Rp. 12,185,600,000 untuk 76,160 orang siswa di 504 unit sekolah dasar negeri dan swasta. Penerimaan dana BOS untuk Kecamatan Suruh juga turun sebesar 1.77 persen menjadi Rp. 711,520,000 untuk 4,347 siswa dari 37 SD negeri dan swasta. Sedangkan dana BOS yang diterima SD Islam Ar Rahmah sendiri justru meningkat sebesar 13.25 persen atau menjadi Rp. 75,200,000 untuk 470 siswa. Dana tersebut tetap merupakan penerimaan BOS terbesar se-Kecamatan Suruh, yaitu 10.57 persen.

Peningkatan dana BOS yang diterima baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun SD Islam Ar Rahmah secara drastis terjadi di Triwulan II tahun 2018. Rata-rata peningkatannya sebesar 98.71 persen dibandingkan pada Triwulan I atau menjadi Rp. 148,480,000. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa SD Islam Ar Rahmah selalu menerima dana BOS tertinggi se-Kecamatan Suruh dalam tiga tahun terakhir, dengan rata-rata 10.13 persen. Semua itu menunjukkan bahwa SD Islam Ar Rahmah memiliki keunggulan dalam manajemen keuangan pendidikan, sehingga dapat mengakselerasi mutu pendidikan, salah satunya status sebagai sekolah favorit diperolehnya sehingga menjadi rebutan siswa untuk masuk.

SD Islam Ar Rahmah Suruh mampu membuktikan bahwa mereka mampu

mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan memiliki jumlah peserta didiknya yang terus bertambah pesat. Berdasarkan hasil observasi awal di bulan Mei 2018 lalu, dalam tiga tahun terakhir SD Islam Ar Rahmah merupakan sekolah dengan jumlah peserta didik terbanyak yaitu lebih dari 450 siswa, jauh di atas rata-rata siswa sekolah dasar lain di Kecamatan Suruh yang sekitar 100 siswa. Padahal di awal berdirinya di tahun 2008 hingga 2010 siswa didik SD Islam Ar Rahmah tidak mencapai 100 orang.

Kelebihan lain yang dimiliki SD Islam Ar Rahmah Suruh adalah tenaga pendidik di sekolah tersebut terbilang kompeten karena rata-rata tenaga pendidik telah memiliki gelar SI Pendidikan dan memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut ditopang juga oleh pemberian konsumsi dari sekolah kepada peserta didik guna menunjang kesehatan mereka dan pemeriksaan dokter secara berkala, sehingga siswa dapat belajar dalam kondisi sehat. Untuk memotivasi belajar lebih lanjut, sekolah juga memberikan *reward* pada siswa dan guru serta karyawan yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik dalam berbagai kategori di akhir tahun pelajaran.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Akdon, Dedy, dan Deni (2015: 28) berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Matin (2014: 8) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif. Pembiayaan tersebut harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan

pengertian tersebut, biaya pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, melainkan juga berkaitan dengan segala sesuatu yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Suharsaputra (2013: 289) berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiaya, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Sedangkan Zymelman dalam Anwar (2003: 109) mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana-dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu, semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Fattah (2017: 62) berpendapat bahwa pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Menurut Minarti (2011: 238), pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan berikut.

- a. Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan, sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.
- b. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Dari beberapa pendapat mengenai pembiayaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kajian mengenai sumber-sumber dana dan pengalokasiannya yang diperlukan untuk berbagai keperluan dalam penyelenggaraan

pendidikan. Alokasi dana pendidikan harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan berbeda dengan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan besarnya dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan keseluruhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi dari mana saja dana diperoleh dan untuk apa saja dana itu digunakan. Pembiayaan pendidikan berarti kegiatan yang ditempuh dalam rangka pencarian sumber dana dan pendistribusiannya untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran pendidikan dilakukan dari penerimaan pembiayaan pendidikan di mana kegiatan tersebut sebisa mungkin dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

### **C. METODE PENELITIAN**

Berikut adalah penjabaran metodologi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan terkait manajemen pembiayaan pendidikan di SD Ar Rahmah Suruh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) karena penelitian ini bertujuan menjabarkan manajemen pendidikan di level mikro di sebuah sekolah dasar. Relevansi penerapan studi kasus dalam penelitian ini, peneliti ingin mengaitkan kebijakan yang berada pada tataran makro ke tataran mikro dengan melihat kasus di sebuah sekolah. Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2009: 60) adalah suatu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Instrumen dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di SD Islam Ar Rahmah. Proses penelitian yang terdiri dari observasi pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil penelitian berlangsung dari bulan Mei 2018 sampai Januari 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi,



dan dokumentasi.

a. Wawancara.

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan guna mendapatkan data-data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Mulyana (2013: 180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid untuk memperoleh data mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di SD Islam Ar Rahmah.

b. Observasi

Selain menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Herdiansyah (2010: 110) berpendapat bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti melakukan observasi langsung di SD Islam Ar Rahmah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi dan lingkungan sekolah, proses KBM, rapat-rapat, realisasi anggaran, dll.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh atau menghimpun dokumen-dokumen atau data-data fisik tentang pembiayaan pendidikan yang ada di SD Islam Ar Rahmah. Alasan digunakannya teknik dokumentasi ini adalah sebagai bukti penguatan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dalam wawancara dan observasi mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Dokumen yang dijadikan sumber antara lain berupa profil sekolah, visi dan misi sekolah, data jumlah peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan di SD Islam Ar Rahmah, fasilitas sekolah, dan RKAS.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar

secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula dengan SD Islam Ar Rahmah. Untuk itu, sekolah menyusun program-program yang akan dilaksanakan ke dalam RKAS. Selain program-program kegiatan sekolah, dalam RKAS tersebut juga tercantum sumber dana serta rincian dana yang dibutuhkan guna melaksanakan program-program tersebut.

Dari enam sistem penganggaran yang ada, yang diterapkan oleh SD Islam Ar Rahmah lebih mendekati *Planning Programming and Budgeting System* (PPBS). Sebagaimana yang disampaikan oleh Anwar (2003: 90), PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sistem anggaran ini mempunyai keuntungan yaitu: (i) Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah; (ii) Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja; (iii) Menghilangkan program yang *overlapping* atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Dari definisi Anwar tersebut, berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait aspek perencanaan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah, sistem penganggaran yang mereka lakukan adalah dengan PPBS, di mana sekolah berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan di awal tahun pelajaran sekolah mengadakan rapat kerja untuk menentukan pembiayaan apa saja yang hendak diusulkan selama satu tahun ke depan. Selain itu, karakteristik PPBS yang mempertimbangkan semua biaya yang terjadi, diharapkan dapat tercermin dari rencana kebutuhan anggaran muncul dari para stakeholders, bukan hanya dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Dengan demikian diharapkan sistem PPBS yang diterapkan di SD Islam Ar Rahmah juga dapat memunculkan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sekaligus merencanakan anggaran setahun ke depan. Dengan kata lain, PPBS dapat dievaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung pos benefit dari masing-masing program.

## **b. Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan**

Pengorganisasian pembiayaan atau keuangan pendidikan adalah kegiatan penatausahaan atau pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena hal ini sangat berguna dalam rangka pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengguna anggaran pendidikan.

Menurut Matin (2014: 92) dalam hal pengorganisasian dan penatausahaan anggaran pendidikan setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan yaitu; pembagian tugas dan wewenang keuangan yang jelas, pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan.

Selain itu, SD Islam Ar Rahmah sudah dapat mengidentifikasi anggaran untuk pengeluaran rutin dan non rutin atau pengeluaran pembangunan. Dalam kegiatan pendataan ini meliputi indentifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifiasian data keuangan, dan melakukan pelaporan keuangan kepada stakeholders. Untuk mengidentifikasi data keuangan pendidikan dilakukan secara mendetil dan ditulis sesuai kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah buku atau jurnal. Setiap pencatatan harus didukung dengan sejumlah faktur, kwitansi, dan nota yang sesuai dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan itu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kegiatan pengorganisasian pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah sudah dilaksanakan secara ideal yang terdiri dari kegiatan inventarisasi sumber dana pendidikan, menentukan besaran anggaran, menganalisisnya, dan mengalokasikan anggaran tersebut. Dalam inventarisasi sumber keuangan pendidikan hal yang perlu dilakukan adalah pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran. Pencatatan transaksi yang dimaksud adalah pengumpulan data secara kronologis yang kemudian akan digolong-golongkan kedalam kategori tertentu agar penyajian dapat diringkaskan. Misalnya sumber dana dari SPP, BOS, hibah yayasan , dan lain sebagainya. SD Islam Ar Rahmah juga sudah melakukan penentuan besaran anggaran di awal tahun ajaran dengan prinsip PROB, lalu dianalisis berdasarkan

skala prioritas dan kecukupan anggaran. Terakhir SD Islam Ar Rahmah juga sudah melakukan analisis alokasi anggaran berdasarkan enam dari enam faktor pertimbangan dasar mengalokasikan anggaran menurut Martin (2014: 122-125). Yaitu atas dasar siswa, guru, ruang belajar dan tujuan bobot pendidikan.

Pengorganisasian dalam konteks pembukuan dan pencatatan secara teknik akuntansi, data keuangan pendidikan yang sudah dicatat, dikelompokkan, dan diikhtisarkan di SD Islam Ar Rahmah sudah dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan pada angka lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bendahara sekolah dan yayasan sudah memiliki kompetensi untuk melakukan hal itu sehingga memudahkan untuk proses pengorganisasian.

Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam konteks penatausahaan atau pembukuan pelaksanaan pendidikan harus dijalani dengan baik setelah melakukan pendataan dan pelaporan keuangan. Kegiatan pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran berbagai macam transaksi-transaksi keuangan yang beredar. Selain berhubungan dengan pencatatan akuntansi juga bergelut dengan melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan, penafsiran laporan dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan penatausahaan keuangan suatu unit kerja.

Dari buku-buku yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akuntansi ini adalah; buku kas umum skontro dan buku kas umum tabelaris. Semua jenis pembukuan yang digunakan dalam hal akuntansi dimaksudkan untuk memiliki kemudahan membaca informasi yang dihasilkan dari kegiatan penatausahaan keuangan pendidikan. Maka dari itu seharusnya pencatatan keuangan pendidik ini harus dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki keahlian dalam akuntansi.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi SD Islam Ar Rahmah sudah menerapkan standar pelaporan seperti itu sehingga memudahkan *stake holder*

dalam menganalisis hasil pembukuan tersebut.

### **c. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan**

Dalam mengevaluasi manajemen pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh, kita dapat membandingkan antara standar yang telah ditentukan dengan pelaksanaan yang dilakukan. Sehingga, dapat diketahui dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah terdapat perbedaan atau tidak antara aturan standar biaya minimal yang ada dengan pelaksanaan di SD Islam Ar Rahmah itu sendiri.

Standar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah standar manajemen pembiayaan pendidikan, di mana menggunakan acuan standar berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Terdapat standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI dan dalam Permen tersebut dipaparkan mengenai ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi non personalia.

Biaya operasi nonpersonalia, meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dina, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industry, dan biaya pelaporan.

Menurut Permen Nomor 69 Tahun 2009, disebutkan bahwa SD/MI jumlah rombongan belajar sebanyak 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik. Kemudian untuk standar biaya operasi nonpersonalia per sekolah, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI adalah sebesar Rp.97.440,-/sekolah, sebesar Rp.16.240,-/rombongan belajar, dan sebesar Rp.580,-/anak. Biaya minimum untuk ATS adalah 10% dan biaya minimum untuk BAHP adalah 10%.

Berdasarkan observasi, rombongan belajar di SD Islam Ar Rahmah sendiri yaitu sebanyak 6 rombongan belajar (kelas 1 sampai dengan kelas 6), di mana pada masing-masing tingkatan kelas memiliki 2 atau 3 ruang kelas. Sehingga, total keseluruhan rombongan belajar di SD Islam Ar Rahmah adalah sebanyak 20 rombongan belajar. Tiap rombongan belajar atau kelas berisi kurang lebih sebanyak

26 siswa.

Biaya operasi nonpersonalia di SD Islam Ar Rahmah adalah sebesar Rp. 187.114.110,-. Kemudian, di SD Islam Ar Rahmah jumlah rombongan belajar sebanyak 20 kelas maka jumlah biaya operasi nonpersonalia adalah sebesar Rp. 9.355.705,-/rombongan belajar, dan jumlah siswa di SD Islam Ar Rahmah sebanyak 465 siswa untuk biaya operasi nonpersonalia adalah sebesar Rp. 22,355,-/anak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SD Islam Ar Rahmah sudah memenuhi standar biaya operasi nonpersonalia bahkan sudah melebihi dari batas minimum yang ditetapkan. Jumlah biaya operasi nonpersonalia SD Islam Ar Rahmah memang cukup besar, namun dapat dilihat bahwa SD Islam Ar Rahmah dapat menggunakan dana dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan sekolah dan lain sebagainya sangat memadai dan menunjang proses pembelajaran siswa SD Islam Ar Rahmah Suruh.

#### **d. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan**

Berbicara mengenai manajemen terutama manajemen pembiayaan tidak jauh hubungannya dengan penggunaan dana untuk suatu keperluan tertentu. Lembaga dalam bidang apa pun akan bertemu dengan masalah keuangan, karena tanpa adanya dana suatu lembaga atau institusi apa pun tidak dapat berjalan dengan lancar karena terganjal masalah pendanaan. Sejumlah dana dibutuhkan untuk penganggaran kebutuhan tertentu dalam suatu lembaga.

SD Islam Ar Rahmah Suruh merupakan salah satu SD swasta yang dikelola oleh Yayasan Ar Rahmah Suruh. Seperti yang telah diungkapkan di atas, dana sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu lembaga dan salah satunya adalah SD Islam AR Rahmah. Terlebih SD Islam Ar Rahmah yang notabene merupakan rintisan bisnis keluarga, membuat Yayasan Ar Rahmah harus memiliki manajemen pembiayaan yang manageable dan jauh dari kata korupsi tentunya.

SD Islam Ar Rahmah sendiri memiliki cara tersendiri dalam menghindari penyalahgunaan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Dapat dikatakan SD Islam Ar Rahmah sangat transparan dalam hal pengelolaan dana. Transparansi ini ditunjukkan dengan melakukan kegiatan seperti rapat terbuka yang

dihadiri oleh semua anggota sekolah yang terkait dengan proses penganggaran pembiayaan pendidikan termasuk pula anggota komite sekolah.

SD Islam Ar Rahmah pun menerima masukan dari orang tua siswa yang disampaikan kepada Komite Sekolah maupun langsung kepada Kepala Sekolah SD Islam Ar Rahmah Suruh. SD Islam Ar Rahmah sendiri memperbolehkan bagi orang tua siswa yang ingin mengetahui bagaimana rincian dana atau untuk penggunaan apa saja dana yang orang tua berikan kepada SD Islam Ar Rahmah Suruh. Hal ini dilakukan pihak SD Islam Ar Rahmah sebagai salah satu bentuk transparansi dalam hal penggunaan dana.

Selain itu, SD Islam Ar Rahmah juga menempelkan informasi di mading berkaitan dengan rencana penggunaan dana dalam 1 tahun, sehingga orang tua siswa juga dapat mengetahui hal-hal berhubungan dengan pembiayaan di SD Islam Ar Rahmah Suruh. Kemudian, anggota sekolah pada saat rapat dalam pembuatan RKAS, hasil dari rapat tersebut dipresentasikan sehingga seluruh anggota rapat mengetahui rencana penggunaan dana yang akan digunakan pada tahun tersebut. Kotak saran juga disediakan oleh pihak sekolah, yang diperuntukkan bagi orang tua siswa, guru yang ingin mengetahui informasi dalam hal apa pun termasuk mengenai pengelolaan dana di SD Islam Ar Rahmah Suruh.

Bentuk transparansi yang dilakukan SD Islam Ar Rahmah tersebut dapat menghindarkan anggota sekolah dari masalah korupsi. Dana yang masuk ke SD Islam Ar Rahmah akan kembali dikelola oleh Yayasan, sehingga pihak Yayasan Ar Rahmah juga dapat memantau penggunaan dana yang digunakan oleh SD Islam Ar Rahmah Suruh. Hal ini sangat membantu pihak SD Islam Ar Rahmah Suruh dalam mengatur keuangan, sehingga manajemen pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pencegahan korupsi di SD Islam Ar Rahmah adalah adanya bentuk transparansi atau keterbukaan SD Islam Ar Rahmah dalam hal pengelolaan dana. Hal ini ditunjukkan dengan memperbolehkan orang tua siswa mengetahui sumber dana dan untuk kebutuhan apa saja dana-dana tersebut digunakan oleh SD Islam Ar Rahmah Suruh.

Kemudian dengan mempresentasikan hasil dari rapat RKAS yang dilakukan

oleh seluruh anggota rapat, menempelkan informasi di mading sekolah khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana di SD Islam Ar Rahmah Suruh, serta menyediakan kotak saran bagi orang tua siswa maupun guru yang ingin menyampaikan kritik dan saran dalam hal apa pun termasuk masalah dana atau biaya di SD Islam Ar Rahmah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah selama berdiri sampai saat ini menurut informasi dari kepala sekolah belum pernah ada pelanggaran yang dilakukan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana yang sudah dibuat.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan meliputi:

1. SD Islam Ar Rahmah merupakan sekolah swasta yang baru berdiri sejak 2008 atau sepuluh tahun yang lalu, namun prestasi SD ini sangat menonjol dan didukung oleh manajemen yang profesional, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Jika di awal beroperasi SD Islam Ar Rahmah hanya memiliki 93 peserta didik, saat ini sudah mencapai 450 peserta didik yang belajar di sana.
2. Proses perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Suruh yaitu Rapat Kerja Tahunan, membuat draft anggaran sesuai tupoksinya, diajukan ke Yayasan untuk disetujui, pembuatan proposal, diajukan kembali ke Yayasan.

Dalam proses penyusunan anggaran masih ada ditemukan guru yang menyusun anggaran sesuai tupoksinya yang hanya ulangan dari anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya memang karena kepala sekolah dan yayasan sangat selektif dalam menerima usulan program atau belanja modal baru yang bernilai investasi tinggi.

3. Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana itu sendiri. Sumber pembiayaan pendidikan SD Islam Ar Rahmah Suruh diperoleh dari beberapa sumber, yaitu; (1) sumber dana yang berasal dari masyarakat seperti, iuran SPP, bantuan dana/hibah; dan (2) sumber dana yang



berasal dari pemerintah, seperti dana BOS. Dana yang diperoleh dialokasikan untuk program-program pengembangan sekolah, belanja rutin (barang dan jasa), dan lain-lain. Kedua pengorganisasian sumber daya manusia yang mengelola dana itu sendiri. Di lihat dari struktur organisasi yang bertanggung jawab mengelola keuangan di SD Islam Ar Rahmah adalah kepala sekolah dibantu oleh guru yang bertindak sebagai bendahara. Sedangkan pengelolaan kebutuhan pembiayaan sudah diserahkan kepada guru masing-masing kelas atau wali kelas untuk diajukan ke sekolah. Setelah mendapatkan persetujuan kepala sekolah, pihak yayasan dan komite melakukan evaluasi kebutuhan yang diajukan tersebut. Selanjutnya bendahara yayasan dapat menyetujui langsung atau dengan revisi pengajuan tersebut. Pada akhirnya, eksekusi finalnya berada di bendahara yayasan yang menyalurkan ke bendahara sekolah apa saja yang menjadi kesepakatan pembiayaan pendidikan selama satu tahun ajaran pendidikan.

4. Pelaksanaan Anggaran di SD Islam Ar Rahmah Suruh digunakan untuk pembiayaan program sekolah serta belanja barang dan jasa. Program sekolah yang membutuhkan dana adalah untuk berbagai macam pengembangan, seperti pengembangan kompetensi lulusan, K13, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, penggalian SDM, seperti pendelegasian guru dalam berbagai acara yang menunjang SDM, seperti pelatihan-pelatihan, seminar, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran untuk belanja barang dan jasa adalah untuk membiayai kebutuhan seperti, kegiatan kurikulum, kesiswaan, kepramukaan, rumah tangga, dan untuk mendukung pembelajaran siswa.
5. Jumlah dana pendidikan yang diterima SD Islam Ar Rahmah tahun ajaran 2017/2018 adalah sebesar Rp. 973,639,467 yang berasal dari APBN II sebesar Rp. 575,180,000. BOS Pusat sebesar Rp. 352,800,000; dan sisa saldo BOS tahun 2017 adalah Rp. 9,659,467.
6. Pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah dilakukan oleh yayasan Ar Rahmah Suruh dan dinas kependidikan. Kemudian, pertanggungjawaban pembiayaan sekolah diserahkan kepada Komite Sekolah, Yayasan Ar Rahmah, dan dinas pendidikan. Yayasan Ar Rahmah Suruh dalam

melakukan pengawasan dilakukan oleh tim yang khusus dibentuk untuk mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap penggunaan dana sekolah adalah menyusun dan membuat laporan anggaran tiap bulannya dan melakukan pelaporan kepada pihak Yayasan Ar Rahmah Suruh, Komite Sekolah dan juga dinas kependidikan.

7. Manajemen keuangan di SD Islam Ar Rahmah Suruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan disusun secara sistematis, mulai dari pengajuan anggaran ke Yayasan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana yang sesuai dengan RKAS, kemudian adanya laporan kendali, yang dikendalikan secara langsung oleh kepala sekolah, hanya saja kegiatannya dilakukan oleh bendahara. Kemudian dapat dilihat bahwa dana pengeluarannya pada bulan Semester 2 tahun 2018 yang menunjukkan prosentase sebesar 40,72% untuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, SD Islam Ar Rahmah Suruh mengacu pada standar peningkatan kualitas sekolah dan berkorelasi positif pada kualitas pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya prestasi yang raih oleh siswa-siswi SD Islam Ar Rahmah Suruh baik dalam bidang akademik maupun non akademik, kompetensi tenaga pengajar yang baik dan keadaan sarana dan prasaran yang menunjang kegiatan operasional sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akdon, Kurniady, Dedy, dan Darmawan, Deni. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Anis, Muhammad. 2013. *Manajemen Pembiayaan di SD Islam Assalamah Ungaran*. Jurnal Pendidikan Unnes.
- Anwar, Idochi. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arianti, Dewi. 2014. *Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong*. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Bastian, Indra. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Cunningham, William dan Cordeiro Paula. 2009. *Educational Leadership: A Bridge to Improved Practice*. New York: Pearson.
- Diamond, Jack. 2003. *From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies*. IMF Working Paper 03/69. International Monetary Fund. Washington.
- Fadillah, Nur, Agung, Gede, dan Yudana, Made. 2015. *Analisis Biaya Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Mutu Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Sukasada Tahun Pelajaran 2013/2014*. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan (Volume 6, No 1 Tahun 2015).
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fitriana, Ana. 2012. *Pembiayaan Pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan Jakarta*. Jurnal Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gaffar, Mohammad Fakry. 2000. *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahan dan Kebijakan dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional*. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia IV. Jakarta 19-22 September.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Haryati, Sri. 2012. *Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional*. Journal of Economic Education Vol 1 No 1 UNNES.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

- Jones, Thomas. 2005. *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Koswara, Deni dan Triatna, Cepi. 2010. *Managemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniady, Dedy, Setiawati, Linda, dan Nurlatifah, Siti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Penelitian Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdyakarya.
- Morphet, E. 2003. *The Economic and Financing of Education*, Fourth Edition New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Nitiswari, Andini. 2015. *Analisis Pembiayaan Pendidikan di SMP Laboratorium Undiskha Singaraja Tahun 2015*. Jurnal Manajemen Pendidikan Unand.
- Nurhadi, Muljani A. 2011. *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX tentang Standar Pembiayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putera, Nusa. 2012. *Penelitian Kualitatif Proses & Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Puspitasari, Siska Nurmala. *Lima Sektor Dana Pendidikan yang Paling Banyak di Korupsi*, diakses dari <http://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2017/05/17/lima-dana-di-sektor->

pendidikan-yang-paling-banyak-dikorupsi-369335 (Selasa, 01 November 2017, pukul 00:34 WIB).

- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sadiarti. 2012. *Pengaruh Manajemen Pembiayaan Sekolah dan Kinerja Kepala Sekolah terhadap Produktivitas Sekolah Menengah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat*. Tesis. Universitas Syah Kuala.
- Schick, Allen. 2008. *Getting Performance Budgeting to Perform*. MPRA Paper No. 9415. May 2008.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 19. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Toyaman, Nina dan Usman, Syaikhu. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. SMERU, Juni.
- Umar, Husein. 2005. *Strategic Management in Action : Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis (Strategic Business Unit berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. Davis dan Wheelen- Hunger)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Wijaya, David. 2009. *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta.
- Yuliani, Hanifah. 2016. *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Nanggulan*. Jurnal Manajemen Pendidikan UNY.